

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 214/PMK.06/2012 TENTANG TATA
 CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN BERANG MILIK NEGARA

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
 TAHUN ANGGARAN

A. PENGGUNAAN BMN
 KANWIL ...

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang		Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi ³⁾		Tidak Dipergunakan untuk Tugas dan Fungsi (Mile) ⁵⁾		Digunakan Pihak Lain ⁴⁾	Keterangan
		Kuantitas ²⁾ (m ² /unit)	Perolehan ³⁾ [Rp] (4)	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. KPKNL									
1.	KPKNL ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									
II. KPB/ Satker									
1.	KPB/ Satker ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									

Keterangan:

1) Diisi Nama KPKNL;

2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;

3) Diisi Rekapitulasi per KPKNL dan per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**B. PEMANFAATAN BMN
KANWIL ...**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Jenis Pemanfaatan ⁴⁾					Keterangan
		Sewa	Pinjam Pakai	Kerjasama Pemanfaatan	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	Jumlah Pencatamaan Negara/PNEBP (Rp) ³⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KPKNL							
1.	KPKNL a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							
II. KPB/Satker							
1.	KPB/Satker a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							

Keterangan:

- 1) Disi Nama KPKNL;
- 2) Disi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Disi rekapitulasi per: KPKNL dan per KPB/Satker; dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**C. PEMINDAHTANGGAPAN BMN
KANWIL ...**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Jenis Pemindahtanganan ²⁾			Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Jumlah Penerimaan Negara/PNBP (Rp) ³⁾	Keterangan
		Penjualan (3)	Tukar Menukar (4)	Hibah (5)			
I. KPKNL							
1.	KPKNL..... ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							
II. KPB/Satker							
1.	KPB/Satker..... ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan.						
2... dst.							

Keterangan:

- 1) Disi Nama KPKNL;
- 2) Disi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Disi rekapitulasi per: KPKNL dan per KPD/Satker; dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 244 /PMK.06/2012
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENJELASAN TERTULIS

KOP 1)

Nomor : S- 2) Tanggal, Bulan,
 Tahun
 Sifat : Segera
 Hal : Permintaan Penjelasan Tertulis

Yth 3)

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaan Saudara, diminta Saudara menyampaikan kepada kami penjelasan/klarifikasi terkait hal-hal sebagai berikut:

1. 4)
2.
3.
4.
5. dst.

Penjelasan/jawaban tertulis beserta dokumen pendukungnya, kiranya dapat kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal/Kepala
 Kanwil.../Kepala KPKNL ..., 5)

.....
 NIP

Tembusan: 6)

1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Menteri/Pimpinan.....;
3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal.....;
4. Direktur BMN;
5. Kepala Kanwil ...

Keterangan pengisian format surat permintaan penjelasan tertulis:

- 1) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.
- 3) Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) atau Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan alamat kantor.
- 4) Diisi dengan hal-hal yang diminta penjelasan/klarifikasinya.
- 5) Disesuaikan dengan pihak yang meminta penjelasan.
- 6) Tembusan disesuaikan dengan Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan jenjang organisasi DJKN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II:
 PERATURAN MENTERI KEJARAN
 NOMOR 244/PMK/06/2012 TENTANG TATA
 CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

**LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
 TAHUN ANGGARAN**

**A. PENGGUNAAN BMN
 KPKNL ...**

No.	Uraian KPB/Satker ¹⁾	Keputusan/Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang Kuantitas ²⁾ (m2/unit)		Perolehan ²⁾ (Rp)		Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi ³⁾		Tidak Dipergunakan untuk Tugas dan Fungsi (Jdlte) ³⁾		Digunakan Pihak Lain ⁵⁾	Keterangan	
		(3)	(4)	Ya	Tidak	Ya	Tidak	(5)	(6)			(7)
1.	KPB/Satker ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan b. Selain Tanah dan/atau bangunan											
2...	dst.											

Keterangan:

- 1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker,
- 2) Diisi rekapitulasi kuantitas dan nilai perolehan yang sudah ditetapkan status penggunaan oleh Pengelola Barang, diinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- 3) Diisi rekapitulasi per KPB/Satker.

**B. PEMANFAATAN BMN
KPKNL ...**

No	Uraian KPB/Satker ¹⁾	Jenis Pemanfaatan ²⁾					Keterangan
		Sewa	Pinjam Pakai	Kejasama Pemanfaatan	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	Jumlah Penerimaan Negara/FNEP (Rp) %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KPB/Satker a. Tanah dan/atau bangunan b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst							

Keterangan:

1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker,

2) Diisi rekapitulasi per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**C. PEMINDAHTANGANNAN BMDY
KPKNL ...**

No	Uratan KPB/Satker ¹⁾	Jenis Pemindahtanganan ²⁾			Penjualan	Tukar Mennkar	Hibah	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Jumlah Penerimaan Negara/PNBP (Rp) ³⁾	Keterangan
		(1)	(2)	(3)						
1.	KPB/Satker ¹⁾									
	a. Tanah dan/atau bangunan									
	b. Selain Tanah dan/atau bangunan									
2...										
dsl										

Keterangan:

1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker,

2) Diisi rekapitulasi per KPB/Satker, dirinci: tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

D. LAPORAN HASIL INVESTIGASI

KPKNL

No.	Uraian KPB/Satker	Uraian BMN	INDIKASI PENYIMPANGAN DAN HASIL INVESTIGASI		TINDAK LANJUT INVESTIGASI	
			PENGUNAAN	PEMANFAATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

.....
Kepala KPKNL

.....
.....

Keterangan:

- 1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 2) Diisi Kode Barang, MUP, Uraian Barang;
- 3) Uraian indikasi penyimpangan dan hasil investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pendaharngaan BMN;
- 4) Uraian tindak lanjut investigasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEHUKUMHAN
 NOMOR 214/PMK.06/2012 TENTANG TATA
 CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN TERANG BILIK NEGARA

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
 TAHUN ANGGARAN

A. PENGGUNAAN BMN
 KANWIL ...

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang		Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi ³⁾		Tidak Dipergunakan untuk Tugas dan Fungsi (Mile) ⁵⁾		Digunakan Pihak Lain ⁴⁾	Keterangan
		Kuantitas ²⁾ (m ² /unit)	Perolehan ³⁾ [Rp] (4)	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. KPKNL									
1.	KPKNL ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									
II. KPB/ Satker									
1.	KPB/ Satker ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi Rekapitulasi per KPKNL dan per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**B. PEMANFAATAN BMN
KANWIL ...**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Jenis Pemanfaatan ⁴⁾					Keterangan
		Sewa	Pinjam Pakai	Kerjasama Pemanfaatan	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	Jumlah Pencatamaan Negara/PNEBP (Rp) ³⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KPKNL							
1.	KPKNL a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							
II. KPB/Satker							
1.	KPB/Satker a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi rekapitulasi per: KPKNL dan per KPB/Satker; dimulai : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**C. PEMINDAHTANGGAPAN BMN
KANWIL ...**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Jenis Pemindahtanganan ²⁾			Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Jumlah Penerimaan Negara/PNBP (Rp) ³⁾	Keterangan
		Penjualan (3)	Tukar Menukar (4)	Hibah (5)			
I. KPKNL							
1.	KPKNL..... ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							
II. KPB/Satker							
1.	KPB/Satker..... ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan.						
2... dst.							

Keterangan:

- 1) Disi Nama KPKNL;
- 2) Disi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Disi rekapitulasi per: KPKNL dan per KPD/Satker; dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

**D. LAPORAN HASIL INVESTIGASI
KANWIL**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Uraian BMN ²⁾	INDIKASI PENYIMPANGAN DAN HASIL INVESTIGASI ⁴⁾ PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	TINDAK LANJUT INVESTIGASI ⁵⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. KPKNL¹⁾						
1.						
2.....						
dst.						
II. KPB/Satker³⁾						
1.						
2.....						
dst.						

.....
Kepala Kanwil

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;
- 4) Uraian indikasi penyimpangan dan hasil investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;
- 5) Uraian tindak lanjut investigasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDJO